



Rencana Strategis

**Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir
dan Laut Pontianak**

2020 - 2024

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Pontianak

KATA PENGANTAR

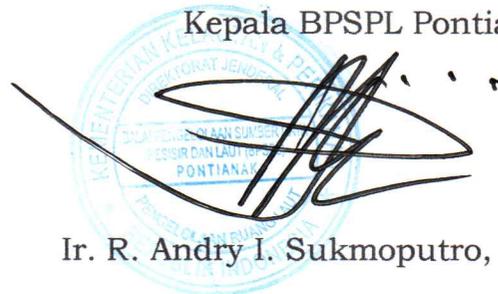
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridho-Nya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak 2020- 2024 dapat diselesaikan. Renstra BPSPL Pontianak 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjabarkan secara teknis Renstra Ditjen PRL tahun 2020–2024 (Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2021).

Dengan adanya Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengelolaan organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta mampu mengantisipasi segala perubahan dalam upaya menuju menjadi instansi yang transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Selain itu Renstra merupakan dasar serta pedoman dalam penyusunan: (1) Rencana Kerja (Renja); (2) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA); (3) Laporan Tahunan; dan (4) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Semoga Renstra ini dapat bermanfaat dalam upaya mewujudkan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil tertata, produktif, berkelanjutan dan menyejahterakan bagi masyarakat kelautan dan perikanan di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak, 28 Desember 2021

Kepala BPSPL Pontianak



Ir. R. Andry I. Sukmoputro, M.M

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	- 26 -
DAFTAR ISI.....	- 26 -
BAB I PENDAHULUAN	- 1 -
A. Latar Belakang.....	- 1 -
B. Kondisi Umum	- 3 -
C. Potensi dan Permasalahan	- 9 -
D. Lingkungan Strategis	- 23 -
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	- 26 -
A. Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan	- 26 -
B. Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan.....	- 26 -
C. Tujuan	- 27 -
D. Sasaran.....	- 28 -
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	- 31 -
A. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PRL	- 31 -
B. Kerangka Kelembagaan	- 33 -
BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	- 37 -
A. Indikator Kinerja Kegiatan 2020-2024.....	- 37 -
B. Kerangka Pendanaan	- 42 -
BAB V PENUTUP	- 43 -
LAMPIRAN	
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BPSPL PONTIANAK TAHUN 2020- 2024	- 37 -

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. RPJMN 2020 – 2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju.

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh bangsa;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menetapkan lima arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian Visi Indonesia 2045 yang meliputi pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. Kelima arahan utama Presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, yang terdiri atas:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
5. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
6. memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan kemananan, dan transformasi pelayanan publik.

Presiden juga memberikan dua arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk:

1. membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil kelautan dan perikanan, dan petambak garam, serta para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan;
2. memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Dalam menjabarkan RPJMN dan arahan Presiden RI terkait dengan pembangunan Kelautan dan Perikanan tersebut, telah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2020 – 2024 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 serta Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020 – 2024.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dimaksud, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak, menyusun Renstra BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024 sebagai acuan dan penjabaran agenda pembangunan, arahan Presiden dan Menteri serta Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dalam rangka mencapai tujuan Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Dengan demikian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi basis dalam perwujudan program pengelolaan ruang laut dalam 5 (lima) tahun kedepan.

B. Kondisi Umum

Periode kurun waktu 2015-2019, telah banyak yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPSPL Pontianak, Ditjen PRL baik secara kelembagaan maupun kegiatan di lapangan untuk pemanfaatan potensi sumberdaya alam hayati laut maupun dalam mengurangi dampak bencana alam maupun akibat kegiatan manusia. Meski belum berdampak secara signifikan, namun dengan keterbatasan yang ada, BPSPL Pontianak berupaya untuk menjawab tantangan dalam pengelolaan ruang laut di seluruh wilayah kerjanya yakni pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah se-Kalimantan.

Secara garis besar, target Indikator Kinerja Utama (IKU) BPSPL Pontianak telah dipenuhi dan direalisasikan dengan baik. Kegiatan yang telah dilakukan oleh BPSPL Pontianak terkait mendukung upaya perencanaan ruang laut yaitu pendampingan penyusunan dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur untuk melakukan penetapan dokumen RZWP3K menjadi Peraturan Daerah diantaranya :

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2038
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2038
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2039
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2041

Adanya UU No.11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja melahirkan 3 Peraturan Pemerintah, yaitu :

1. PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, amanah dari PP ini disimplifikasi 2 menjadi 1 Permen KP.
2. PP Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, amanah dari PP ini disimplifikasi dari 15 menjadi 3 Permen KP
3. PP Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan, amanah dari PP ini disimplifikasi dari 40 menjadi 19 Permen KP

PP Nomor 21 Tahun 2021 mempengaruhi penyusunan dokumen rencana zonasi di Dit. Perencanaan Ruang Laut yang memberikan mandat, antara lain :

- Penyusunan materi teknis Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) yang akan diintegrasikan dengan PP tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
- Penyusunan materi teknis Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) yang akan diintegrasikan dengan PP tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
- Penyusunan materi teknis ruang perairan Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang akan diintegrasikan dengan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN).
- Penyusunan dan penetapan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup dan situs warisan dunia di Laut dengan Peraturan Presiden tersendiri.
- Penyusunan materi teknis ruang perairan di sekitar PPKT (Pulau-Pulau Kecil Terluar) yang akan diintegrasikan dengan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) sudut kepentingan Pertahanan Keamanan di Kawasan Perbatasan Negara.
- Pemberian persetujuan teknis materi teknis Perairan Pesisir yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, yang akan diintegrasikan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P).

Hasil koordinasi dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN terkait integrasi Rencana Tata Ruang dengan Rencana Zonasi TA. 2022, dengan tenggang waktu penyelesaian integrasi antara 18-24 Bulan. Untuk mencapai target tenggang waktu yang diberikan keterlibatan UPT sangat dibutuhkan. Selain itu dengan adanya UU Cipta Kerja mengatur proses bisnis berusaha dengan adanya PP No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Resiko, dimana Dit. PRL memberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut sebelum persetujuan lingkungan diberikan dan bersama

provinsi, UPT DJPRL mengidentifikasi serta inventarisasi pemanfaatan dan perizinan kegiatan eksisting di perairan pesisir.

Dalam upaya pengelolaan Kawasan Konserasi Perairan Daerah (KKPD) Kalimantan, BPSPL Pontianak telah melaksanakan survei biofisik dan sosial ekonomi dalam rangka mendukung penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) di Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Ketapang (Kalimantan Barat) pada tahun 2019. Selain itu juga melakukan pengumpulan data dukung RPZ di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara melalui koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara.

BPSPL Pontianak juga melakukan beberapa kegiatan dalam rangka konservasi jenis diantaranya :

1. Pelayanan perizinan rekomendasi Hiu dan Pari di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Rekomendasi yang telah terbit dalam kurun tahun 2016 – 2019 yaitu sebanyak 1606 surat.
2. Penyediaan data series Penyu yang dimulai sejak tahun 2015 di Pantai Paloh, Kalimantan Barat ; Pulau Denawan, Pulau Pemalikan, dan Pulau Samber Gelap (Kalimantan Selatan) ; dan Pulau Birah-Birahan (Kalimantan Timur). Dalam kurun tahun 2015 – 2019 jenis penyu yang ditemukan Penyu Hijau, Penyu Sisik, dan Penyu Lekang.
3. Penyediaan data series Hiu dan Pari yang dimulai sejak tahun 2015 - 2019 di lokasi pelabuhan pendaratan ikan Kalimantan Barat (PPI Sungai Kakap dan PPN Pemangkat) dan tahun 2016 – 2019 di Muara Kintap, Kalimantan Selatan dan di PPI Manggar, Kalimantan Timur.
4. Monitoring Kima yang dilaksanakan di Pulau Lemukutan, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat pada tahun 2015.
5. Monitoring Kima dan pembuatan Taman Kima di Pulau Lemukutan, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat pada tahun 2016. Taman

Kima Lemukutan selanjutnya diresmikan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut bersama Bupati Bengkayang.

6. Monitoring Dugong yang dilaksanakan di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Selatan pada tahun 2015. Lokasi kemunculannya terdapat di perairan Kecamatan Kumai (Desa Kubu, Desa Sungai Bakau, dan Desa Teluk Bogam).
7. Monitoring Hiu Paus yang dilaksanakan pada tahun 2015 di Talisayan, Kalimantan Timur. Hiu paus ditemukan sebanyak 17 ekor yang terdiri dari 16 ekor jantan dan 1 ekor betina.
8. Monitoring terumbu karang yang dilaksanakan pada tahun 2016 di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat.
9. Monitoring Pesut yang dilaksanakan pada tahun 2017 di Kalimantan Barat. Lokasi kemunculan terdapat di Perairan Tanjung, Desa Paket, Simpang Lidah, Teluk Batang, dan Muara Bumbun.
10. Survei potensi ekosistem pesisir dan laut dalam rangka penyediaan data series di KKPD Pulau Derawan, Kalimantan Timur yang dilaksanakan pada tahun 2019.
11. Pengembangan dan rehabilitasi Taman Kima di Pulau Lemukutan dan Pulau Derawan pada tahun 2019.
12. Respon cepat penanganan Biota Laut terdampar di wilayah kerja BPSPL Pontianak dalam kurun tahun 2015 – 2019.

BPSPL Pontianak berperan dalam pemberian bantuan pemerintah untuk Kelompok Penggerak Konservasi (KOMPAK) melalui pelaksanaan proses identifikasi calon kelompok penerima bantuan KOMPAK. Pada tahun 2018, ada 6 kelompok masyarakat yang menerima bantuan pemerintah yang tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Sedangkan pada tahun 2019, ada 4 kelompok yang menerima bantuan pemerintah yang tersebar di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Dalam mendukung upaya pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, BPSPL Pontianak telah melaksanakan kegiatan diantaranya :

1. Identifikasi kawasan rehabilitasi ekosistem mangrove di Kalimantan Barat pada tahun 2016. Penyerahan bibit sebanyak 50.000 bibit di Kabupaten Singkawang, 130.000 bibit di Kabupaten Bengkayang, dan 50.000 di Kabupaten Mempawah untuk dilakukan penanaman mangrove.
2. Jejaring kemitraan dengan melakukan Penguatan Ekowisata melalui Kemah Pemuda Pesisir pada tahun 2017 dan 2018 di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Pada tahun 2018 dilakukan Kemah Pemuda Pesisir 3 Negara (Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam)
3. Pemberian Bantuan Sarana Pengolah Sampah Plastik untuk BUMDes Barokah di Desa Aluh-Aluh Besar, Kec. Aluh-Aluh, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan dan KSM Nibung Alam Hijau di Desa Sui Nibung, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat pada tahun 2017
4. Pendampingan dalam rangka pemberian bantuan berupa satu paket peralatan selam di Pulau Maratua, Kab. Berau, Kalimantan Timur pada tahun 2018
5. Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) di Pantai Kijing, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat dan Pantai Saloloang, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada tahun 2018 serta di Pantai Kura-Kura, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat pada tahun 2019
6. Diskusi kelompok terpumpun dalam rangka pemetaan kebutuhan bantuan sarana dan prasarana di Pulau Marabatuan, Kalimantan Selatan pada tahun 2019

BPSPL Pontianak juga menerima penghargaan dari Menteri Kelautan dan Perikanan atas prestasi memperoleh predikat sebagai unit kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2018.

C. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kalimantan memiliki sumber daya alam yang penting bagi pembangunan ekonomi. Potensi sumber daya alam hayati dan non hayati pesisir terdiri dari terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut yang perlu dijaga kelestariannya agar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia yang memiliki luas wilayah sebesar 542.430,35 km² terdiri dari lima provinsi diantaranya Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Adapun jumlah total Kabupaten/Kota di Kalimantan yaitu sebanyak 56 Kabupaten/Kota. Dari jumlah total Kabupaten/Kota tersebut, Kabupaten/Kota yang memiliki pesisir sebanyak 30 Kabupaten/Kota dengan total panjang garis pantainya mencapai 9.790,24 km. Selain itu, Kalimantan memiliki 778 pulau-pulau kecil dan 4 pulau-pulau kecil terluar.

Provinsi Kalimantan Barat merupakan provinsi yang berbatasan dengan Laut Natuna dan Selat Karimata, sebelah utara berbatasan dengan Sarawak (Malaysia), sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Kalimantan Tengah serta sebelah timur berbatasan dengan Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Ekosistem mangrove hampir terdapat di semua peisisir Kalimantan Barat. Luas ekosistem mangrove di Kalimantan Barat yaitu 177.479,52 Ha yang tersebar di 7 kabupaten/ kota pesisir. Keanekaragaman pada mangrove di Kalimantan Barat sangat unik dan langka, di Kabupaten Kubu Raya terdapat beberapa spesies pohon langka seperti *Bruguiera hainesii* (Bakau Mata Buaya) yang hanya terdapat di Singapura, Malaysia, Papua Nugini dan Indonesia; serta *Kandelia candel* (Lenggadai Betina) yang merupakan endemik Kalimantan dan Sumatera. Mangrove di Kalimantan Barat juga merupakan habitat dari Bekantan (*Nasalis larvatus*) dan Pesut (*Orcaella brevirostris*). Dari total luasan mangrove di

Kalbar, Kubu Raya merupakan kawasan terluas, yakni 129.604,125 hektar. Di hutan mangrove Kubu Raya juga terdapat 33 jenis mangrove sejati dari 40 jenis mangrove sejati yang ada di Indonesia. Kondisi mangrove di Kalimantan Barat secara keseluruhan tergolong dalam kondisi “sedang” hingga “baik” dengan spesies dominan adalah *Avicennia* spp. dan *Rhizophora* spp.

Ekosistem terumbu karang di Kalimantan Barat banyak terdapat di perairan Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Ketapang, Luas ekosistem Terumbu Karang secara keseluruhan yaitu 71.634, 47 Ha. Dari hasil survei BPSPL Pontianak tahun 2019 di Kabupaten Bengkayang, kondisi terumbu karang tergolong dalam kondisi “sedang” hingga “baik” dengan tutupan karang hidup berkisar antara 24% - 51%.

Ekosistem lamun di Kalimantan Barat hanya terdapat di perairan Kabupaten Bengkayang dan Ketapang dengan luas keseluruhan yaitu 29.345,50 Ha. Dari hasil survei BPSPL Pontianak tahun 2019 di Kabupaten Bengkayang ekosistem lamun hanya berupa spot - spot kecil yang tersebar di Pulau Lemukutan dan pulau Penata Besar dengan kategori tutupan jarang dan tergolong dalam kondisi “miskin”, dengan spesies yang ditemukan yaitu *Thalassia hemprichii* dan *Enhalus acoroides*.

Sedangkan di perairan Kabupaten Ketapang, berdasarkan hasil survei BPSPL Pontianak tahun 2019, lamun disana berupa hamparan yang bisa disebut dengan padang lamun. Padang lamun di perairan Pulau Gelam Ketapang, memiliki tutupan tergolong kategori padat dengan rata-rata tutupan lamun sebesar 51,04 %, mengacu pada KepMen LH No. 200 Tahun 2004 status kondisi padang lamun termasuk ke dalam kurang kaya. Terdapat 7 spesies lamun yang ditemukan di perairan Ketapang yaitu *Enhalus acoroides*, *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea serrulata*, *Cymodocea rotundata*, *Halodule uninervis*, *Syringodium isoetifolium* dan *Thalassodendron Ciliatum*.

Di Kalimantan Barat terdapat habitat peneluran penyu sepanjang 63 km di Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas. Penyu yang sering bertelur adalah jenis penyu hijau (*Chelonia mydas*) dan penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*). Selain di Sambas, habitat peneluran penyu juga terdapat di Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang, Pulau Randayan, Pulau Seluas dan Pulau Baru Kabupaten Bengkayang serta Pantai Nibung Kabupaten Kubu Raya. Dari beberapa kejadian mamalia laut terdampar, diduga perairan laut Kalimantan Barat juga merupakan habitat dari beberapa jenis mamalia laut yaitu Pesut Pesisir (*Orcaella brevirostris*), Lumba-Lumba Bungkuk Indo Pasifik (*Sousa cinensis*), Lumba-Lumba Tanpa Sirip (*Neophocaena phocaenoides*) dan Dugong (*Dugong dugon*). Dugong hanya dijumpai di perairan laut Kabupaten Ketapang dikarenakan banyak ditemukan lamun sebagai makanan utamanya. WPP 711 juga merupakan daerah penangkapan hiu dan pari yang sebagian besar hasil tangkapannya di daratkan di TPI Sungai Kakap Kubu Raya. Dari hasil pendataan oleh enumerator hiu dan pari yang didaratkan di TPI Sungai Kakap didominasi jenis hiu yaitu *Sphyrna lewini* dan *S. mokarran* serta dari genus *Carcharhinus*, sedangkan jenis pari yang didaratkan yaitu *Rhincobatus australiae*, *R. springeri*, *Glaucotegus thypus* dan *Rhina ancylostoma*. Di perairan tawar Kalimantan Barat juga terdapat spesies endemik yaitu Arwana (*Scleropages formosus*) tepatnya di danau-danau yang terdapat di Kabupaten Kapuas Hulu, selain itu juga terdapat ikan Belida (*Chitala borneensis*).

Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dataran rendah dengan topografi datar terutama pada wilayah bagian selatan provinsi Kalimantan Tengah. Wilayah pesisir Kalimantan Tengah dengan ketinggian sekitar 25,92% terletak pada ketinggian 0-7 m dpl. Untuk wilayah pesisir, sebagian besar wilayah pesisir Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dataran rendah, yang berkisar antara 0 – 25 meter dari permukaan laut. Hanya sebagian wilayah Kecamatan Arut Selatan dan Kumai yang memiliki ketinggian yang bisa mencapai 500 m terutama

di bagian utara. Kondisi wilayah pesisir dengan ketinggian < 5 m, menyebabkan terendam secara periodik terutama pada saat pasang tertinggi dan curah hujan cukup tinggi, seperti Kecamatan Jelai, sebagian Pantai Lunci, Seruyan Hilir, Seruyan Hilir Timur, sebagian Katingan Kuala dan Kapuas Kuala. Kemiringan lahan wilayah pesisir Kalimantan Tengah dominan pada wilayah datar dan berombak (0-8 %) yang mencapai 94,10% dari luas total wilayah pesisir, tersebar di seluruh Kecamatan Pesisir, kecuali di Kecamatan Arut Selatan dan Kumai yang memiliki kelerengan bergelombang sampai berbukit (8 - 25%). Hasil analisis batimetri dari Peta Pushidros-AL (2015) menunjukkan di perairan < 4 mil laut kedalaman maksimum hanya 8 m. Kedalaman landai terutama terdapat di wilayah Kecamatan Jelai yakni Tanjung Selaka (tengah), dimana kontur kedalaman 3 mencapai jarak 7,2 km. Sedangkan di wilayah Pantai Lunci kontur kedalaman 3 m mencapai jarak 2,7 - 4,8 km. Untuk perairan sungai terutama alur dan muara Sungai Jelai maksimal 5 m. Perairan pesisir Kalimantan Tengah merupakan daerah yang relatif cukup terbuka dari serangan gelombang laut dalam karena berhadapan dengan Laut Jawa. Akibat hantaman gelombang tersebut, menyebabkan wilayah ini sebagian besar pantainya telah terabrasi dari Pantai Jelai sampai Pantai Kapuas, sedangkan di muara sungai relatif terjadi sedimentasi.

Ekosistem mangrove wilayah pesisir dan laut di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Luas hutan mangrove di provinsi Kalimantan Tengah diperkirakan kurang lebih 346.540 Ha yang tersebar di sepanjang pantainya. Mangrove di Kalimantan Tengah dapat ditemukan hampir pada semua kabupaten yang memiliki wilayah pesisir, mulai dari Kabupaten Sukamara di wilayah paling barat sampai ke Kabupaten Kapuas di wilayah paling timur. Mangrove di Kabupaten Sukamara tersebar mulai pantai di sebelah barat Sungai Jelai sampai Desa Sungai Pasir. Sungai Jelai sebelah timur juga

didominasi oleh hutan mangrove sampai Desa Sungai Pundung. Secara umum jenis mangrove yang dominan adalah jenis Api-api, Bakau, Nipah, Cemara Laut dan Rambai. Sedangkan di Kabupaten Kabupten Kapuas, jenis mangrove yang dominan adalah Api-api, Bakau, Plarak dan Nipah. Perbedaan komposisi tegakan mangrove di wilayah pesisir Kalimantan Tengah ini diperkirakan karena adanya pengaruh salinitas tanah (Supriharyono, 2000).

Terumbu karang di provinsi Kalimantan Tengah secara umumnya tersebar dengan tipe gosong/taka (*patch reef*) yang terpusat di Teluk Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat. Terumbu karang di perairan Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan peta Pushidros TNI AL ditemukan di sekitar Gosong Senggora dan Gosong Sepagar yang terletak di sisi barat pantai Tanjung Puting atau arah tenggara dari Tanjung Penghujan. Terumbu karang di Gosong Senggora tumbuh pada kedalaman 1-5 m, dimana jarak pandang kecerahan memiliki kisaran 3,11-3,27 m (sampai dasar perairan) pada saat surut, di saat pasang 3,65-3,94 m. Karakteristik karang di perairan Gosong Senggora merupakan karang yang umum dijumpai di perairan keruh. Beberapa genera karang yang dijumpai pada ratahan terumbu seperti *Acropora* bercabang, *Goniopora*, *Favia*, *Favites*, *Goniastrea*, *Galaxea*, *Fungia*, *Turbinaria*, *Montipora*, *Pectinia*, *Diplostrea* dan *Porites*. Sementara pada lereng terumbu umumnya dijumpai *Galaxea*, *Turbinaria*, *Porites*, *Favia*, *Pectinia* dan *Tubastrea*. Semua jenis karang termasuk kedalam filum Cnidaria (Coelenterata). Ancaman tersebar terumbu karang di perairan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah banjir akibat kegiatan deforestasi dan illegal logging sehingga jangkauan air tawar semakin ajuh memasuki kawasan terumbu selain itu penggunaan alat tangkap seperti lampara yang mengaduk dasar perairan dapat menyebabkan peningkatan kekeruhan.

Padang lamun di pesisir Kalimantan Tengah sejauh ini hanya ditemukan di pesisir perairan Kabupaten Kotawaringin Barat yang tersebar di sepanjang pantai dan Laut. Lamun yang tumbuh di sepanjang

pantai pada kedalaman berkisar antara 0,2 meter hingga 3 meter, sedangkan yang tumbuh di perairan lat pada kedalaman yang berkisar antara 1 meter hingga 6 meter. Sebaran di sepanjang pantai meliputi Desa Kubu, Tanjung Keluang, Tanjung Pandan, Sungai Bakau, Teluk Bogam dan Tanjung Penghujan dengan memperlihatkan lamun yang tumbuh berpola dominasi tunggal jenis *Enhalus acoroides*. Sedangkan di perairan laut meliputi Gosong Pinggir, Gosong Sepagar, Gosong Berendam dan Gosong Senggora dengan jenis lamun cenderung berpola campuran yaitu *Thalassia hemprichii*, *Halophila minor*, *Cymodocea serrulate*, *Enhalus acoroides* berkembang bersama-sama dengan saling membagi ruang tumbuh. Jenis lamun yang teridentifikasi ini termasuk dalam famili Hydrocharitaceae, kecuali jenis *Cymodocea serrulata* yang termasuk famili Potamogetonaceae.

Biota dilindungi di Kalimantan Tengah antara lain dugong, teripang, penyu, pesut, lumba-lumba, dugong, hiu dan pari. Dugong diketahui bermigrasi ke daerah gosong senggora-sepgar, gosong beras basah di kawasan perairan Kumai untuk mencari makan di kawasan padang lamu yang terdapat di perairan tersebut. Rute migrasi penyu di Kalimantan Tengah dapat ditemukan di wilayah pesisir Kalimantan Tengah seperti pantai Sungai Cabang Barat, Pantai Sungai Perlu dan Pantai Tanjung Keluang.

Secara geografis wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang berbatasan dengan laut (Kabupaten pesisir) terdiri 31 kecamatan pesisir dari lima kabupaten pesisir yakni dengan rincian yaitu Kabupaten Barito Kuala dan Banjar (masing-masing memiliki 1 kecamatan pesisir), Tanah Laut dan Tanah Bumbu (masing-masing memiliki 6 kecamatan pesisir) dan Kabupaten Kotabaru (memiliki 17 kecamatan pesisir). Total luas kecamatan pesisir tersebut sebesar 10.723,96 km² atau 42,49% dari total luas kabupaten pesisir atau 28,76% dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Tipe ekosistem mangrove di pesisir Kalimantan Selatan, didominasi oleh *Rhizophora* sp, *Sonneratia* sp dan *Excoecaria* spp, *Xylocarpus* sp, *Bruquiera* sp. Berdasarkan pengamatan dan identifikasi yang dilakukan di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan muara sungai Provinsi Kalimantan Selatan ditemukan 28 jenis mangrove.

Wilayah Kalimantan Selatan yang memiliki ekosistem terumbu karang terdapat di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru. Hamparan terumbu karang di wilayah Tanah Bumbu tersebar mulai dari Kecamatan Simpang Empat, Batulicin, Kusan Hilir, Sungai Loban, Angsana dan Satui, dengan jarak antara 200 – 9.500 meter (0,11 – 5,13 mil laut) dari garis pantai dan kedalaman berkisar 0 – 16 meter. Angka 0 menunjukkan bahwa karang berada sangat dekat dengan permukaan air laut, bahkan timbul pada saat surut terendah. berdasarkan hasil analisis citra Alos tahun rekam 2010/2011 dan Citra Landat (2016) diidentifikasi lebih banyak titik gugusan karang di Kabupaten Tanah Bumbu yaitu sebanyak 77 titik dengan total luas gugusan 340,42 Ha. Sedangkan di Kabupaten Kotabaru didapatkan luas gugusan terumbu karang seluas 10943,230 ha. Dari hasil identifikasi yang telah dilakukan di wilayah perairan Provinsi Kalimantan Selatan, beberapa genera karang dari ordo *Scleractinia* (true stony), Non *Scleractian* dan ordo *Alcyonacea* (soft coral).

Ekosistem padang lamun (*sea grass*) di wilayah pesisir Kalimantan Selatan hanya dijumpai pada perairan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru. Pada umumnya, tumbuhan ini berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kedalaman yang dangkal 1 – 6 m, pada substrat pasir halus, pasir lumpur ataupun bercampur dengan sedikit pecahan karang. Berdasarkan hasil analisis citra satelit Alos (2011) dan Landsat (2016) diperoleh luas lamun/alga sebesar 1.079,22 ha di perairan Kabupaten Kotabaru dan luas lamun/alga sebesar 20,37 ha. Di wilayah Kabupaten Kotabaru antara lain di perairan Kecamatan Pulau Laut Barat, perairan Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, dan perairan Kecamatan Pulau Sebuku dan perairan Sungai Dua Laut Kabupaten

Tanah Bumbu. Jenis lamun yang ditemukan di Kecamatan Pulau Laut Barat adalah jenis *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea serrulata*, *Enhalus acoroides* dan *C. Rotundata* yang tersebar di beberapa lokasi seperti Teluk Tamiang dan Tanjung Kuyit. Di perairan Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, jenis lamun yang ditemukan seperti *Halodule pinifolia*, *Thalassia hemprichii* dan *Enhalus acoroides*, sedangkan jenis *Halophila beccari* hanya di pantai Timur Pulau Kerayaan. Jenis lamun ini umumnya tersebar di Pulau Kerayaan, Pulau Tepian Mataja, Pulau Kerasian, Pulau Kerumputan dan Pulau Titipan Indah. Untuk jenis *Thalassia hemprichii*, *Cymodocea serrulata* dan *Enhalus acoroides* umumnya ditemukan di perairan Kecamatan Pulau Sebuku, yakni di Pulau Samber Gelap. Sedangkan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu hanya antara lain perairan Desa Sungai Dua Laut (Tanjung Kandang Haur, Karang Penyulingan, Karang Katoang) dan Pulau Burung. Di perairan kabupaten ini cukup sedikit potensi padang lamunnya. Berdasarkan hasil lapangan jenis lamun yang ada di perairan Desa Sungai Dua laut adalah *Cymodocea serrulata*, *Halodule pinifolia*, *Halophila ovalis* dan *Thalassia hemprichii* sedangkan di perairan Pulau Burung hanya ditemukan 1 jenis yakni *Enhalus acoroides*.

Beberapa biota endemik dan dilindungi di Kalimantan Selatan yaitu penyu dengan wilayah migrasi di Kabupaten Kotabaru seperti wilayah selatan yakni pulau-pulau di Kecamatan Pulau Sembilan, Teluk Tamiang, pulaupulau kecil di Kecamatan Pulau Laut Kepulauan dan Kepulauan, wilayah timur yakni Kepulauan Samber Gelap, Gosong Mangkok dan Pulau Lari Larian, wilayah utara yakni Tanjung Pemancingan. Ikan paus (cetacea) jenis *Pseudorca crassidens* atau yang biasa dikenal dengan False killer whale. di perairan sebelah barat Pulau Tepian Mataja atau sebelah selatan Pulau Kerumputan. Dugong/ Duyung (*Dugong dugon*), Pesut di wilayah perairan Kotabaru, Lumba-lumba, Hiu dan Pari.

Morfologi wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil di Provinsi Kalimantan timur dominan berupa daratan bergelombang (50,98%)

dengan kelas kelerangan (2% - 8%) (64,98%) yang tersebar di sepanjang pesisir kecuali di wilayah Biduk – Biduk Berau yang merupakan wilayah karst, daerah perbukitan dengan kemiringan lereng (8% - 16%) sebanyak 22,01% tersebar di wilayah yang jauh dari pesisir terutama di wilayah barat Paser, Penajem Paser Utara dan sebagian wilayah Kutai Timur dan Barat Berau. Kondisi DAS juga sangat mempengaruhi wilayah pesisir, setidaknya terdapat 80 DAS yang berada di wilayah ini. Dari peta Pushidrosal (2015) dan pengukuran, menunjukkan bahwa kedalaman perairannya sangat beragam mulai dari 0 – 4800 m. Hal ini sebagai pembatas antar lempeng Kalimantan dan lempeng Sulawesi yang terpisah oleh Selat Pontianak dan Laut Sulawesi. Jika dilihat dari pengaruh oseanografi dan letak geografis dipastikan bahwa kondisi pesisir dan pulau – pulau kecil di Kalimantan timur berada di pantai timur Kalimantan, sehingga mempengaruhi pembangkitan gelombang.

Hasil pengamatan dan identifikasi yang dilakukan di wilayah pesisir, pulau – pulau kecil dan muara sungai Provinsi Kalimantan Timur ditemukan 27 spesies tumbuhan di kawasan ekosistem. Mangrove dimana diantaranya terdapat 14 jenis mangrove sejati yakni *Avicennia marina*, *Avicennia alba*, *Avicennia rumphiana*, *Avicennia officinalis*, *Rhizophora apiculate*, *Rhizophora mucronate*, *Bruguera cylindrica*, *Bruguera sexangular*, *Bruguera gymnorhiza*, *Sonneratia alba*, *Sonneratia caseolaris*, *Nypah fruticans*, *Xylocarpus granatum*, *Excoecaria agallocha*. Berdasarkan hasil analisis, luas hutan mangrove di wilayah pesisir di Kalimantan Timur sebesar 244.437,32 Ha, sebagaimana diketahui mangrove hampir terdapat di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Palaran Kota Samarinda dengan kondisi, luas dan kerapatan yang berbeda dominan di sekitar teluk dan muara sungai.

Wilayah perairan Kalimantan Timur merupakan salah satu wilayah yang memiliki ekosistem terumbu karang dengan keanekaragaman yang sangat tinggi (setidaknya terdapat 460 jenis) yang tersebar mulai dari pesisir utara (laut Sulawesi) sampai selatan (selat Pontianak) dengan tipe

karang cincin (atoll), karang tepi (fringing), karang penghalang (barrier) dan karang data ratau gosong dari kedalaman 1 m sampai dengan 40 m. Tingginya kekayaan biodiversitas berada di wilayah ini merupakan sub sistem ekologi dalam suatu bio eco region Coral triangle. Kawasan Corak Triangle dikenal sebagai pusat karang dunia yang merupakan wilayah terumbu karang terluas di dunia dengan luas 75.000 km², memiliki sekitar 500 spesies terumbu karang, 3000 spesies ikan, sumber penghidupan 120 juta penduduk dengan perputaran ekonomi US\$ 2,3 Milyar/Tahun. Selain itu kawasan ini berfungsi sebagai sumber plasma nutfah dan sumber bahan farmasi di masa depan, wilayah migrasi ikan dan mamalia, kawasan yang berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan dan menyangga perubahan iklim dunia. Berdasarkan hasil analisis citra Landsat (2017 – 2018) total luas gugusan terumbu karang di wilayah perairan Kalimantan Timur 118.963,418 ha.

Ekosistem padang lamun (sea grass) di wilayah pesisir Kalimantan Timur banyak tumbuh dan berkembang pada daerah – daerah yang relatif tenang dan terdapat gugusan karang didepan sebagai penghalang. Pada umumnya, tumbuhan ini berada di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil dengan kedalaman dangkal 1 – 6 m, pada substrat pasir halus, pasir lumpur ataupun bercampur dengan sedikit pecahan karang. Berdasarkan hasil analisis citra satelit Landsat (2017/2018) dan Data LIPI dan BIG diperoleh luas lamun/alga sebesar 13.119.004 ha. Secara spasial sebaran ini ditunjukkan pada beberapa lokasi, meski demikian untuk membedakan lamun atau alga yang terdapat di lokasi tersebut dilakukan survey lapangan (ground check) sehingga didapatkan wilayah potensi lamun dan/atau asosiasi dengan alga. Oleh karena ini sifatnya partial, maka dilakukan beberapa pengamatan yang dilakukan secara perwakilan daerah lamun yang dianggap cukup banyak. Data hasil perhitungan tutupan laun diketahui untuk menentukan status padang lamun menurut Kepmen LH Nomor 200 tahun 2004, dapat dikategorikan status baik kondisi kaya/sehat dengan penutupan > 30 – 59,9% dan status

rusak kondisi miskin dengan penutupan < 29.9%. Jenis yang diketemukan di wilayah ini seperti *Enhalus acoroides*, *Thalassua hemprichii*, *Cymodocea rotundata*, *Cymodocea serrulate*, *Halodule uninervis*, *Halodule pinifolia*, *Halophila ovalis*, *Syringodium isoetifolium*. Wilayah perairan Berau dan Bontang merupakan daerah yang memiliki padang lamun, karena wilayah ini relating terlindung dengan substrat dasar pasir dan pasir halus.

Salah satu biota endemik dan dilindungi di Kalimantan Timur adalah Pesut Mahakam (*Irrawaddy dolphin*) yang sering juga disebut dengan lumba – lumba air tawar. Pesut Mahakam sendiri merupakan kerabat dari pesut sungai di Asia Tenggara dan satu – satunya habitat mamalia langka ini ada di Sungai Mahakam dan Delta Berau, Kalimantan Timur. Pada tahun 2015 diestimasi kurang lebih terdapat 71 ekor berdasarkan metode foto identifikasi sirip panggung. Beberapa biota laut yang termasuk dilindungi seperti Hiu Paus di Talisayan, Napoleon dan beberapa jenis spesies Hiu dan Pari yang masuk dalam kategori Appendiks II CITES yang sering ditemukan diantaranya *Mobula japonica*, *Carcharhinus falciformis*, *Carcharhinus longimanus*, *Zygaena lewini* dan *Alopias pelagicus* masih sering didapatkan di wilayah perairan Kalimantan Timur. Saat ini juga terdapat penurunan tempat peneluran penyu yang semula berjumlah 8 tempat menjadi 6 pulau yang terdapat di pesisir Kabupaten Berau, adapun jenis penyu yang diketemukan adalah penyu Sisik.

Provinsi Kalimantan Utara adalah sebuah provinsi termuda di Indonesia yang terletak di bagian utara Kalimantan. Secara geografis, Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur di bagian utara dan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur di bagian Selatan. Sedangkan di bagian Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi.

Pulau-pulau kecil di Provinsi Kaltara terletak di Kabupaten Nunukan, Bulungan, Tana Tidung, dan Kota Tarakan. Jumlah pulau-

pulau kecil di Provinsi Kaltara adalah 161 pulau dengan luas total mencapai 3.597 km². Pulau-pulau terbesar yaitu Pulau Tarakan (249 km²), Pulau Sebatik (245 m²), Pulau Nunukan (233 km²), dan Pulau Tanah Merah (352 km²). Pulau-Pulau Kecil Terluar terletak di Pulau Sebatik dan Pulau Karang Unarang yang juga merupakan alokasi ruang Kasawan Strategis Nasional Tertentu (KSNT). Adapun panjang garis pantai provinsi Kaltara adalah sepanjang 3.955 km, 908 km (23%) merupakan garis pantai daratan dan 3.047 km (77%) merupakan garis pantai kepulauan.

Morfologi pantai di Provinsi Kalimantan Utara didominasi oleh wilayah estuari yang ditumbuhi mangrove dengan persentase sekitar 89,24% dari panjang total garis pantai Provinsi Kalimantan Utara. Delta merupakan jenis morfologi pantai yang paling sedikit dijumpai di Provinsi Kalimantan Utara. Wilayah estuaria dimaksud banyak ditemukan di Kabupaten Bulungan dengan luas 1950,18 Ha yang ditumbuhi mangrove. Selain itu Kabupaten Bulungan juga merupakan daerah terluas untuk pantai jenis pantai berpasir, pantai berbatu, dan pantai tebing.

Kawasan mangrove di Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan hasil analisis spasial, luasannya mencapai 180.981,7 ha dengan kondisi substrat dominan lumpur berpasir. Dari luas tersebut, kawasan mangrove terbesar berada di wilayah pesisir Kabupaten Nunukan dengan luas sekitar 77.171,3 Ha atau sekitar 42,64% dari luas total. Sementara itu, wilayah dengan luas hutan mangrove paling sedikit adalah Kota Tarakan hanya sekitar 587,9 Ha atau sekitar 0,32% dari luas total. Jenis vegetasi mangrove yang ditemukan di Provinsi Kaltara diantaranya *Bruguiera gymnorhiza*, *Bruguiera cylindrica*, *Nypa fruticans*, *Sonneratia alba*, *Ceriops tagal*, *Rhizophora apiculate*, *Avicennia officinalis*, *Acanthus illicifolius*.

Alokasi ruang untuk zona hutan Mangrove yang masuk dalam wilayah perencanaan RZWP3K Provinsi Kalimantan Utara hanya terdiri dari satu zona (KPU-HM-PT) dan satu subzona (KPU-HM-PT-01) dengan luasan sekitar 49,29 ha. Kawasan Hutan Mangrove ini terdapat di perairan Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan. Dari segi jenis

pemanfaatannya, hutan mangrove yang masuk dalam alokasi ruang ini termasuk dalam kategori hutan mangrove Pemanfaatan terbatas.

Provinsi Kaltara juga memiliki sebaran ekosistem lamun yang terdapat di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan dengan luas mencapai sekitar 10,8 Ha. Jenis lamun yang ditemui yaitu jenis *Halophila ovalis*, *Halodule uninervis*, dan *Thalassia hemprichii* dengan kerapatan yang bervariasi dari 40 – 70 %.

Terumbu karang di Provinsi Kalimantan Utara ditemukan beberapa jenis kategori terumbu karang, yakni kategori dead coral alga, pecahan karang, dan karang hidup. Luas terumbu karang terluas ditemukan di wilayah Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan yakni seluas 68,49 Ha. Terumbu karang merupakan suatu ekosistem unik perairan tropis dengan tingkat produktifitas dan keanekaragaman biota yang sangat tinggi. Salah satu biotanya yang dilindungi ditemukan yaitu ikan Napoleon dengan status Appendiks II CITES.

Wilayah Provinsi Kalimantan Utara juga merupakan salah satu jalur migrasi biota yaitu penyu. Penyu yang paling banyak ditemukan yaitu Penyu Hijau. Salah satu Jalur migrasi penyu hijau di Provinsi Kalimantan Utara adalah berasal dari Filipina melewati Pulau Sebatik, Bunyu, Tanah Kuning. Pulau Sebatik merupakan salah satu pulau yang menjadi tempat bertelur penyu. Selain penyu, Provinsi Kalimantan Utara juga merupakan salah satu jalur migrasi lumba-lumba. Salah satu lokasi migrasi (ruaya) lumba-lumba adalah di perairan Sungai Sesayap Tana Tidung mulai dari perairan Tarakan sampai ke Sesayap dan alur migrasi lumba-lumba lainnya dari Bunyu ke Sesayap. Penyu dan lumba-lumba merupakan biota laut yang dilindungi penuh dengan status Appendiks I CITES.

Wilayah Kalimantan juga mempunyai potensi dalam pengelolaan biofarmakologi seperti pemanfaatan sumber daya ubur-ubur yang ditemui di perairan Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

2. Permasalahan

Pada saat ini, BPSPL Pontianak memiliki berbagai isu program prioritas yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui kegiatannya. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

- 1) Tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang laut dan pemanfaatannya yang melebihi daya dukung. Hal ini perlu adanya integrasi antara matra darat dan matra laut yang diwujudkan melalui integrasi antara rencana tata ruang dengan rencana zonasi. Kemudian dilakukan monitoring pemanfaatan ruang laut untuk mengecek kesesuaian pemanfaatan ruang laut eksisting dengan rencana tata ruang /zonasi. Dalam hal perizinan pemanfaatan ruang laut, diwujudkan dengan penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL).
- 2) Pengelolaan Kawasan Konservasi yang belum efektif. Upaya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yaitu mengimplmentasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No. 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.
- 3) Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES belum optimal. KKP sebagai Otoritas Manajemen CITES perlu dilakukan penguatan dengan mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 61 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi Dan/Atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora*. Dalam implementasinya, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana dalam pelayanan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk appendiks CITES termasuk di dalamnya pengembangan ilmu dan teknologi.
- 4) Masih minimnya kesadartahuan masyarakat akan pentingnya kelestarian biota laut yang dilindungi. Hal ini terus dilakukan kegiatan

sosialisasi jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk dalam appendiks CITES kepada masyarakat.

- 5) Ancaman abrasi pantai yang dapat merusak ekosistem pesisir. Hal ini dilakukan upaya rehabilitasi pesisir melalui kegiatan penanaman mangrove dan pembangunan pelindung pantai. Selain itu, kondisi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil yang begitu rentan dengan bencana alam diperlukan penguatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.
- 6) Pencemaran pesisir dan laut yang mengancam kehidupan biota laut. Hal ini dilakukan upaya restorasi seperti aksi bersih pantai dan laut serta sosialisasi kepada masyarakat.
- 7) Kurangnya tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar. Hal ini mengakibatkan optimalisasi pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik, sehingga perlu peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan, dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem untuk penguatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem.
- 8) Pemanfaatan ekonomi kelautan yang belum optimal seperti seperti biofarmakologi laut dan wisata bahari sehingga perlu dilakukan peningkatan pembangunan infrastruktur yang lebih memadai dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

D. Lingkungan Strategis

Pembangunan kelautan, pesisir dan pulau – pulau kecil tidak dapat dilepaskan dari perkembangan lingkungan strategis yang mencakup lingkungan internal dan eksternal, yang tercantum dalam analisis SWOT berikut ini.

Kekuatan	Kelemahan
<ul style="list-style-type: none"> • Mempunyai potensi ekosistem pesisir (mangrove, lamun, dan terumbu karang) yang berlimpah • Mempunyai keanekaragaman hayati laut dan jenis ikan prioritas pengelolaan KKP yang tinggi • Dukungan mitra seperti Pemerintah Daerah, NGO, dan kelompok masyarakat dalam melakukan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan dalam melakukan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan • Pendataan dan Pendanaan belum komprehensif serta konsisten untuk menggali potensi sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. • Sarana prasarana pelayanan di wilayah kerja yang masih belum lengkap.
Peluang	Ancaman
<ul style="list-style-type: none"> • Adanya potensi PNBP melalui penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) rekomendasi, Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI), dan rekomendasi untuk para pengusaha yang melakukan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES serta Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak 	<ul style="list-style-type: none"> • Ancaman abrasi pantai yang dapat merusak ekosistem pesisir. • Pemanfaatan jenis ikan yang tidak sesuai ketentuan pemanfaatan. • Pencemaran pesisir dan laut yang mengancam kehidupan biota laut. • Tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang laut dan pemanfaatannya yang melebihi daya dukung • Perizinan penanaman modal asing di pulau-pulau kecil dan

<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya kolaborasi dengan mitra dalam pengelolaan konservasi	pulau-pulau kecil terluar di wilayah kerja BPSPL Pontianak yang belum <i>clean and clear</i> , terlebih di wilayah kerja BPSPL Pontianak memiliki Pulau Maratua dan Pulau Sambit yang merupakan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT)
---	--

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi KKP tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mendukung visi KKP, maka Visi Ditjen PRL 2020 – 2024 adalah “Pengelolaan Ruang Laut Yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP”. Dengan demikian Visi BPSPL Pontianak adalah **”Pengelolaan Ruang Laut di Wilayah Kalimantan menuju terwujudnya Visi Ditjen PRL”**

B. Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;

2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

Dalam rangka mendukung misi KKP tersebut, Ditjen PRL mempunyai 3 (tiga) misi yaitu:

1. peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
2. peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
3. peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di lingkungan Ditjen PRL.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut dan dalam rangka mewujudkan Visi BPSPL Pontianak, maka, ditetapkan Misi BPSPL Pontianak yaitu:

1. Perencanaan Ruang laut di lingkup wilayah kerja BPSPL Pontianak
2. Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak;
3. Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak;
4. Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan di lingkup wilayah BPSPL kerja Pontianak;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan di lingkup wilayah kerja BPSPL Pontianak.

C. Tujuan

Menjabarkan misi di atas, BPSPL Pontianak merumuskan tujuan pengelolaan ruang laut 2020-2024 sebagai berikut:

1. Misi Perencanaan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
2. Misi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan:
 - 1) meningkatkan dayaguna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak
 - 2) Meningkatkan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau – pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak
3. Misi Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan di lingkup wilayah BPSPL Pontianak dengan tujuan meningkatkan penataan dan memanfaatkan jasa-jasa kelautan di wilayah kerja BPSPL Pontianak
4. Misi Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak dengan tujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan di wilayah kerja BPSPL Pontianak
5. Peningkatan tata Kelola pemerintahan di BPSPL Pontianak dengan tujuan Meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi BPSPL Pontianak

D. Sasaran

Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau – pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak merupakan dukungan atas pelaksanaan pengelolaan ruang laut yang didalamnya mencakup program pengelolaan perikanan dan kelautan, kualitas lingkungan hidup, dan dukungan manajemen. Adapun sasaran kegiatan BPSPL Pontianak Tahun 2020 – 2024 dijabarkan sebagai berikut :

1. Tujuan meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan meningkatnya penataan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
2. Tujuan meningkatkan dayaguna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
 - 1) Meningkatnya Pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar yang difasilitasi pemanfaatannya di wilayah kerja BPSPL Pontianak
3. Tujuan meningkatkan penataan dan memanfaatkan jasa-jasa kelautan di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
 - 1) Terkelolanya kawasan wisata bahari di wilayah kerja BPSPL Pontianak
4. Tujuan meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
 - 1) Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Pontianak
 - 2) Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
 - 3) Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
 - 4) Meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak;
5. Tujuan meningkatkan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau – pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan:
 - 1) Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak;

6. Tujuan meningkatkan kinerja reformasi birokrasi BPSPL Pontianak dengan sasaran kegiatan tatakelola pemerintahan yang baik di BPSPL Pontianak.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PRL

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah merumuskan 5 (lima) Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020 - 2024, salah satunya adalah “Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Karantina Ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait”. Berdasarkan kebijakan ini, maka dirumuskan arah kebijakan Ditjen PRL Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- 1) perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang partisipatif, serasi dan implementatif;
- 2) pengelolaan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati perairan yang lestari dan berkelanjutan;
- 3) pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari dan mandiri;
- 4) pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 5) penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi kelautan;
- 6) tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen PRL.

Strategi pelaksanaan kegiatan BPSPL Pontianak yang akan ditempuh untuk masing – masing arah kebijakan Ditjen PRL Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang partisipatif, serasi, dan implementatif melalui:
 - a. Pendampingan dalam penerbitan KKPRL yang didelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah di wilayah kerja BPSPL Pontianak;

- b. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana tata ruang/ rencana zonasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
 - c. Dukungan pemberian KKPRL dan/atau insentif pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
 - d. Pengelolaan data KKPRL di wilayah kerja BPSPL Pontianak.
2. Pengelolaan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati Laut yang lestari dan berkelanjutan melalui:
- a. Pendampingan Penetapan Kawasan Konservasi Daerah (KKD) di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
 - b. Pendampingan pelaksanaan Evaluasi Efektivitas Pengelolaan KKD di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
 - c. Penyediaan data sebaran dan status populasi jenis ikan dilindungi/terancam punah di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
 - d. Pemulihan populasi/ Pengayaan jenis ikan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
 - e. Inisiasi daerah perlindungan habitat penting jenis ikan di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
 - f. Rehabilitasi Habitat kritis jenis ikan dilindungi/terancam punah di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
 - g. Penanganan Biota Dilindungi di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
 - h. Pelayanan perizinan/ peredaran pemanfaatan keanekaragaman hayati di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
 - i. Inisiasi jejaring dan Kerjasama konservasi Kawasan dan keanekaragaman hayati laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
 - j. Pemberian Bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

3. Pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari dan mandiri melalui:
 - a. Dukungan dalam rangka Pemanfaatan PPK/T di wilayah kerja BPSPL Pontianak

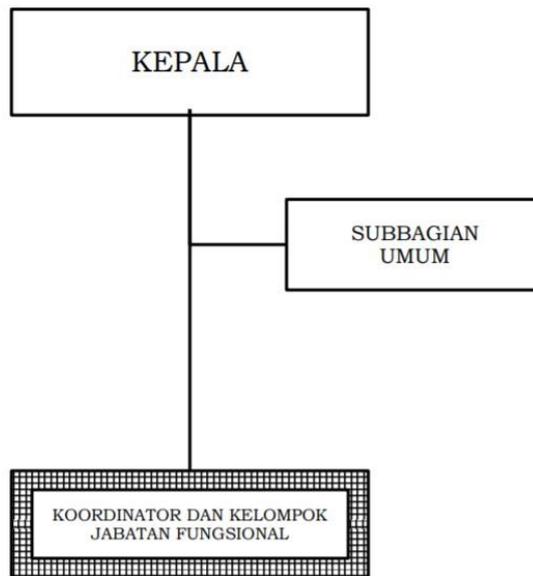
4. Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil melalui:
 - a. Identifikasi Kawasan Mangrove di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
 - b. Penanaman Mangrove di wilayah kerja BPSPL Pontianak;
 - c. Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan ekosistem Pesisir di wilayah kerja BPSPL Pontianak.

5. Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dalam rangka Optimalisasi Potensi Ekonomi Kelautan melalui:
 - a. Fasilitasi Pengembangan Desa Wisata Bahari di wilayah kerja BPSPL Pontianak;

6. Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen PRL melalui:
 - a. Pengelolaan SDM Aparatur dan tata laksana di BPSPL Pontianak;
 - b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja di BPSPL Pontianak;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik di BPSL Pontianak;
 - d. Pengelolaan Keuangan, Barang Milik Negara, Pengadaan Barang Jasa dan Umum di BPSPL Pontianak.

B. Kerangka Kelembagaan

Struktur organisasi BPSPL Pontianak diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut.



Struktur Organisasi BPSPL Pontianak

BPSPL Pontianak memiliki wilayah kerja yang mencakup seluruh wilayah pesisir dan laut Kalimantan. Saat ini, ada 2 (dua) kantor wilayah kerja yang berada di Balikpapan, Kalimantan Timur untuk membantu menjalankan tugas dan fungsi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selanjutnya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk membantu menjalankan tugas dan fungsi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Adapun Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang ada di BPSPL Pontianak yaitu Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Perencana Ahli Muda, Pengelola Eksosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama, dan Pengelola Eksosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama.

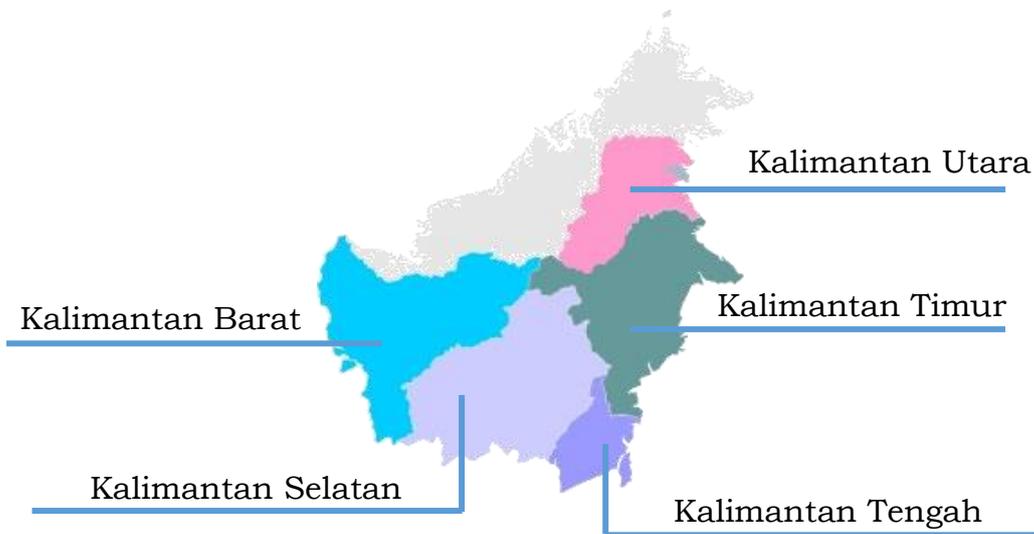
Total SDM yang dimiliki BPSPL Pontianak hingga tahun 2021 dalam menunjang pencapaian tujuan organisasi adalah 60 orang, yang terdiri dari 46 berstatus ASN dan 14 Tenaga Kontrak. Komposisi SDM yang ada di BPSPL Pontianak pada saat Penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut:

1. Sub Bagian Umum, dengan total SDM 9 orang yang terdiri dari 2 Jabatan Fungsional Pengelola Keuangan dan 8 Jabatan Fungsional Umum, yaitu:
 - JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN Muda (1 Orang)
 - JF Analis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama (1 Orang)
 - Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan (1 Orang)
 - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (1 Orang)
 - Bendahara Pengeluaran (2 Orang)
 - Analis Organisasi dan Tata Laksana (1 Orang)
 - Pengadministrasian Barang Milik Negara (1 Orang)
 - Pengadministrasian Persuratan (1 Orang)
 - Pengadministrasian Umum (1 Orang)
2. Sub Koordinator Program dan Evaluasi, dengan total SDM 7 orang yang terdiri dari 1 Jabatan Fungsional Pengelola Keuangan dan 6 Jabatan Fungsional Umum, yaitu:
 - JF Perencana Muda (1 Orang)
 - Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (3 Orang)
 - Analis Perencanaan (3 Orang)
3. Sub Koordinator pendayagunaan dan Pelestarian, dengan total SDM 29 orang yang terdiri dari 16 Jabatan Fungsional PELP dan 13 Jabatan Fungsional Umum.
 - JF PELP Muda (1 Orang)
 - JF PELP Pertama (15 Orang)
 - Analis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir (4 Orang)
 - Analis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (2 Orang)
 - Analis Kelautan dan Perikanan (5 Orang)
 - Pengadministrasian Umum (2 Orang)

Untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang semakin kompleks, ke depan diperlukan pengembangan SDM yang lebih profesional dengan penambahan jabatan fungsional lain yang ada di Direktorat Jenderal PRL, yaitu JF Analis

Pengelolaan Jasa Kelautan, JF Bidang Perencanaan dan Penataan Ruang Laut serta JF lainnya.

Untuk meningkatkan efektivitas dan rentang kendali yang lebih dekat, maka SDM tersebut ditempatkan pada 3 provinsi wilayah kerja BPSPL Pontianak, meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Total mencakup 30 Kabupaten/Kota Pesisir yang tersebar di 5 Provinsi di Pulau Kalimantan. Wilayah kerja BPSPL Pontianak adalah seperti pada peta dan gambar di bawah ini.



BAB IV

INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Indikator Kinerja Kegiatan 2020-2024

Upaya Pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024, yang dilaksanakan melalui Arah Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Ditjen PRL, maka BPSPL Pontianak telah menyusun kegiatan beserta sasaran dan indikator kinerja yang mendukung Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Sasaran Kegiatan beserta Indikator Kinerja Kegiatan BPSPL Pontianak 2020 – 2024 dapat dilihat pada matriks dibawah ini:

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan BPSPL Pontianak 2020 - 2024

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
PROGRAM KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP							
1	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Pontianak	1 Luas kawasan konservasi yang diusulkan penetapannya di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Ha)	300.000	28.404,22	-	39.000	69.000
2	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Pontianak	2 Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	2	6	9	9	9
3	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak	3 Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	2	4	5	5	5
4	Meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama	4 Kelompok masyarakat yang menerima bantuan konservasi di	1	4	2	3	3

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
	dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak							
		5	wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok) Kesepakatan Jejaring, Kemitraan /Kerjasama dan Konvensi dalam mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)	2	2	1	2	2
5	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak	6	Kawasan penanaman mangrove yang diidentifikasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak (kawasan)	3	-	-	-	-
		7	Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)	2	-	-	-	-
		8	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)	1	-	-	-	-
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN								
6	Meningkatnya penataan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak	9	Laporan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut, Penyelenggaraan KKPRL/Insentif Pemanfaatan Ruang Laut BPSPL Pontianak (dokumen)	-	-	1	1	1

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
7	Terkelolanya kawasan wisata bahari di wilayah kerja BPSPL Pontianak	10 Kawasan pengembangan wisata bahari yang diidentifikasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)	-	-	-	1	1
8	Meningkatnya Pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar yang difasilitasi pemanfaatannya di wilayah kerja BPSPL Pontianak	11 Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya di wilayah kerja BPSPL Pontianak (pulau)	-	-	-	1	1
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
9	Tatakelola pemerintahan yang baik di BPSPL Pontianak	12 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5
		13 Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Pontianak (indeks)	72	73	74	75	76
		14 Nilai WBK BPSPL Pontianak (Nilai)	78	78	79	79	80
		15 Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPSPL Pontianak (%)	90	91	91	92	92
		16 Persentase unit kerja BPSPL Pontianak yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90
		17 Rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPSPL Pontianak yang	60	65	70	75	80

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
		dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)					
18		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSPL Pontianak (Nilai)	88	89	89	90	90
19		Nilai Kinerja Anggaran BPSPL Pontianak (Nilai)	85	86	87	88	89
20		Persentase penyelesaian temuan LHP BPK BPSPL Pontianak (%)	100	100	100	100	100

B. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan proyeksi kerangka kebutuhan dana dalam rangka mencapai sasaran kegiatan BPSPL Pontianak selama lima tahun ke depan. Sumber dana pendanaan BPSPL Pontianak diperoleh dari sumber APBN yang secara rinci tercantum pada lampiran matriks kerangka pendanaan.

BAB V PENUTUP

Renstra BPSPL Pontianak tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan, yang disusun untuk menjabarkan secara teknis RPJMN Tahun 2020-2024 (Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2020), Resntra KKP tahun 2020-2024 (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020), dan Renstra Ditjen PRL tahun 2020-2024 (Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2021), sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024.

Renstra BPSPL Pontianak tahun 2020-2024 ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) BPSPL Pontianak dan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan pada periode 2020-2024 di wilayah kerja BPSPL Pontianak, serta akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Renstra BPSPL Pontianak tahun 2020-2024 ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan juga dihasilkan berkat adanya dukungan stakeholders dan dukungan sektor terkait lainnya serta masyarakat luas. Kerja keras dari seluruh jajaran KKP dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

**MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK
2020-2024**

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp. MILIAR)					TOTAL 2020 - 2024 (Rp. MILIAR)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
TOTAL BPSPL PONTIANAK							13,258	10,408	10,774	11,7	12,15	58,29
Program Kualitas Lingkungan Hidup							5,53	2,66	1,98	2,5	2,7	15,37
Perlindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut							0,929	2,66	1,98	2,5	2,7	10,769
	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan di wilayah kerja BPSPL Pontianak						0,185	0,2	0,025	0,15	0,2	0,76
	Luas kawasan konservasi yang diusulkan penetapannya di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Ha)	300.000	28.404,22	-	39.000	69.000						
	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Pontianak						0,073	0,44	0,445	0,5	0,55	2,008
	Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan,	2	6	9	9	9						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp. MILIAR)					TOTAL 2020 - 2024 (Rp. MILIAR)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	perbaiki habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Jenis)											
	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Pontianak						0,503	1,001	1,135	1,2	1,3	5,147
	Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak (Jenis)	2	4	5	5	5						
	Meningkatnya jejaring, kemitraan/kerjasama dan konvensi konservasi keanekaragaman hayati Laut di Wilayah Kerja BPSPL Pontianak						0,161	0,723	0,375	0,5	0,5	2,259
	a. Kelompok masyarakat yang menerima bantuan konservasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kelompok)	1	4	2	2	2						
	b. Kesepakatan Jejaring, Kemitraan /Kerjasama	2	2	1	2	2						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp. MILIAR)					TOTAL 2020 - 2024 (Rp. MILIAR)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	dan Konvensi dalam mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kesepakatan)											
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil							4,601	-	-	-	-	4,601
	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak						4,601	-	-	-	-	4,601
	Kawasan penanaman mangrove yang diidentifikasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak (kawasan)	3	-	-	-	-						
	Kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)	2	-	-	-	-						
	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)	1	-	-	-	-						
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							-	-	0,4	0,6	0,65	1,65

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp. MILIAR)					TOTAL 2020 - 2024 (Rp. MILIAR)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Perencanaan Ruang Laut							-	-	0,4	0,45	0,5	1,35
	Meningkatnya penataan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Pontianak						-	-	0,4	0,45	0,5	1,35
	Laporan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut, Penyelenggaraan KKPRL/Insentif Pemanfaatan Ruang Laut BPSPL Pontianak (dokumen)	-	-	1	1	1						
Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan							-	-	-	0,1	0,1	0,2
	Terkelolanya kawasan wisata bahari di wilayah kerja BPSPL Pontianak						-	-	-	0,1	0,1	0,2
	Kawasan pengembangan wisata bahari yang diidentifikasi di wilayah kerja BPSPL Pontianak (Kawasan)	-	-	-	1	1						
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil							-	-	-	0,05	0,05	0,1
	Meningkatnya Pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar yang difasilitasi pemanfaatannya di wilayah kerja BPSPL Pontianak						-	-	-	0,05	0,05	0,1

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp. MILIAR)					TOTAL 2020 - 2024 (Rp. MILIAR)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah pulau-pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya di wilayah kerja BPSPL Pontianak (pulau)	-	-	-	1	1						
Program Dukungan Manajemen							7,479	8,037	8,364	8,6	8,8	41,28
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Ruang Laut							0,381	0,76	0,612	0,65	0,7	3,103
	Tatakelola pemerintahan yang baik di BPSPL Pontianak						0,381	0,76	0,612	0,65	0,7	3,103
	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Pontianak (%)	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5						
	Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Pontianak (indeks)	72	73	74	75	76						
	Nilai WBK BPSPL Pontianak (Nilai)	78	78	79	79	80						
	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPSPL Pontianak (%)	90	91	91	92	92						
	Persentase unit kerja BPSPL Pontianak yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	82	84	86	88	90						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET					ALOKASI PENDANAAN (Rp. MILIAR)					TOTAL 2020 - 2024 (Rp. MILIAR)
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPSPL Pontianak yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	60	65	70	75	80						
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPSPL Pontianak (Nilai)	88	89	89	90	90						
	Nilai Kinerja Anggaran BPSPL Pontianak (Nilai)	85	86	87	88	89						
	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK BPSPL Pontianak (%)	100	100	100	100	100						
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal						0,302	0,387	0,139	0,25	0,3	1,377
	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana internal/overhead lingkup BPSPL Pontianak	100	100	100	100	100						
	Layanan Perkantoran						6,796	6,889	7,614	7,7	7,8	36,8
	Jumlah pemenuhan layanan perkantoran lingkup BPSPL Pontianak (bulan)	12	12	12	12	12						